



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDIATMONO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERBENDAHARAAN/KEGIATAN
3. NHK : 93193

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	547.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/27 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000		
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000		
3. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
4. Bangunan Seluas 106 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
5. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	57.550.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
3. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
4. LAINNYA, - SEPEDA TANDEM RAKITAN SECOND Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.817.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.578.911

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. ----

Rp. 700.946.411

III. HUTANG

Rp. 42.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 658.946.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.